**BAB II**

**KUDETA MILITER DI THAILAND 2014**

Teknik dasar kudeta, merupakan sebuah operasi untuk menduduki organ-organ sentral sebuah negara, termasuk melakukan penetralan kekuasaan dengan menduduki tempat-tempat simbolis kekuasaan pemimpin negara.

 Pengambilalihan kekuasaan, selain menduduki organ-organ sentral oleh para pelaku kudeta, juga disertai dengan pemberhentian para penjabat pemerintahan atau para pemegang kekuasaan negara, karena jika hal ini tidak terlaksana, maka akan terjadi perlawanan terhadap gerakan kudeta tersebut dan kudeta tersebut kemungkinan besar akan gagal.

1. **Gambaran Kudeta Militer di Thailand**
	* 1. **Pemicu Kudeta Militer[[1]](#footnote-1)**

Sejarah politik Thailand didominasi oleh kudeta-kudeta militer. Kekuasaan absolut monarki diakhiri pada tahun 1932 oleh sebuah manuver militer. Menyadari bahwa monarki dapat memainkan peran sebagai benteng reaksi, para pemimpin kudeta mendirikan sebuah rejim monarki konstitusional dengan Majelis Nasional yang setengah ditunjuk dan setengah terpilih secara tidak langsung. Pemilu demokratis secara penuh tidak diizinkan karena pihak militer menganggap massa terlalu bodoh untuk memilih pemerintah mereka sendiri – ini adalah mantra yang sekarang diulang oleh para pengunjuk rasa anti-pemerintah mengenai para petani di Thailand bagian utara.

Dalam cara Bonapartis yang khas, pemerintah militer ini bersandar pada otoritas Raja untuk menopang dirinya sendiri dan menghapus elemen – elemen radikal yang menyerukan nasionalisas tanah. Namun, ketika konflik dengan monarki muncul, pemerintah tidak ragu-ragu untuk bersandar pada militer untuk menghancurkan kaum royalis dan memperkuat posisi mereka sendiri.

Kekuatan militer, monarki sebagai benteng reaksi, dan kebencian kelas penguasa terhadap demokrasi telah menjadi karakteristik politik Thailand sejak saat itu. Setelah Perang Dunia II dimana Thailand bersekutu dengan Jepang, negeri ini kemudian menjadi sekutu penting bagi Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Amerika Serikat selalu mengandalkan kediktatoran militer untuk menopang kelas penguasa Thailand dalam melawan sentimen revolusioner yang muncul dari lapisan bawah akibat kemiskinan yang menimpa rakyat (57% dari penduduk hidup dalam kemiskinan pada awal tahun 1960) dan meningkatnya ketidaksetaraan.

Kondisi kemiskinan yang dialami oleh petani, yang merupakan mayoritas penduduk Thailand, dan ketiadaan kebebasan politik menyebabkan pemberontakan petani dari awal tahun 1970-an dan pemberontakan mahasiswa pada tahun 1973, yang keduanya secara brutal dihancurkan oleh militer. Pada tahun 70-an terjadi ketidakstabilan lebih lanjut serta kudeta yang tujuan utamanya untuk menghapus ide-ide komunis, yang penyebarannya telah memberikan dorongan besar bagi petani dan pemberontakan mahasiswa pada awal dekade tersebut.

Kampanye anti-komunis tersebut membuka jalan bagi berkembangnya dominasi pasar bebas dan peningkatan jumlah warga miskin pada 1981-1988. Daerah pedesaan di Utara dan Timur-laut memiliki standar hidup terburuk, di mana pada awal 1990-an terdapat 85 % dari warga miskin yang tinggal di daerah-daerah tersebut, dan antara 1/5 sampai 1/7 dari penduduk di wilayah ini hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut masih terjadi kendati pertumbuhan ekonomi besar di Thailand dengan rata-rata 12,4 % per tahun antara 1985-1996. Yang kaya semakin kaya sementara yang miskin menjadi lebih miskin .

Gelembung "keajaiban ekonomi Asia", di mana Thailand memainkan peran penting, meledak pada tahun 1997 dengan runtuhnya ekonomi di sekitar faksi-faksi penguasa yang bertengkar satu sama lain untuk menjarah ekonomi Thailand yang sedang berkembang. Untuk pertamakalinya dalam sejarah Thailand, negara ini menghadapi krisis besar yang diselesaikan oleh kaum borjuis tanpa harus menggunakan kudeta militer. Hal ini bukan karena tidak ada faksi yang ingin mengambil kendali perekonomian yang telah menyusut 10,8% dalam satu tahun, bukan pula karena mereka ingin bertanggung jawab atas intervensi IMF dan syarat-syarat bailout IMF.

Krisis Keuangan Asia, yang disebabkan oleh meledaknya gelembung spekulatif dari uang panas dari Barat yang mengalir keluar masuk Asia Tenggara, merupakan gejala dari over-produksi global yang muncul pada saat itu, yang terekspresikan dalam sebuah krisis ekonomi internasional umum pada saat ini.

Non-intervensi militer pada saat itu sama sekali tidak membuat perbedaan bagi rakyat. Tanpa kendaraan politik partai buruh, tanpa organisasi serikat buruh yang sesungguhnya, dan kaum tani yang adalah mayoritas penduduk, membuat mereka tak berdaya dalam menghadapi serangan IMF. IMF diberikan hak untuk langsung campur tangan dalam perekonomian Thailand untuk memotong pengeluaran publik dan mereformasi lembaga-lembaga keuangan agar lebih kondusif untuk eksploitasi pasarbebas. Dengan kata lain, mereka diberi kebebasan untuk menyerang rakyat pekerja dan petani yang telah banyak menderita. Militer Thailand sangat senang meninggalkan pekerjaan kotor ini kepada IMF.

* + 1. **Militer dan Demokrasi Thailand[[2]](#footnote-2)**

Pada tahun 1932, terjadi kudeta pertama dalam sejarah politik Thailand. Pada kudeta tersebut terjadi intervensi militer yang mengubah sistem pemerintahan Thailand yang monarki absolut. Sejak saat itu, pihak militer mengambil kontrol atas kekuasaan negara selama 60 tahun lamanya. Hal ini menyebabkan perpecahan antara demokrasi dengan militer. Setelah kudeta pertama terjadi, terjadi siklus pada setiap perubahan pemerintahan, dimulai dengan kudeta, pemilu, periode singkat pemerintahan sipil, lalu terjadi krisis politik dan kembali lagi pada tahap kudeta.

Pada tahun 1947, kembali terjadi kudeta pada pemerintahan Thailand. Kudeta ini dilaksanakan agar para petinggi militer lainnya mendapatkan jabatan senior di pemerintahan. Namun, setelah kudeta tersebut, terjadi perpecahan di dalam tubuh angkatan bersenjata itu sendiri karena terjadi perebutan kekuasan. Meskipun begitu, dominasi politik dalam pemerintahan oleh militer tidaklah tergoyahkan.

Pada tahun 1957, Panglima Sarit menggulingkan Panglima Tertinggi Pibul, Phin, dan Jendral Polisi Phao, setelah itu melakukan kudeta pada tahun 1958. Sarit melakukan kudeta tersebut dengan tipe konservatisme dan kapitalisme. Pemerintahan militer pun menjadi semakin menguat setelah kudeta yang dilakukan oleh Sarit. Setelah kudeta kedua terjadi di tahun yang sama, Sarit sadar bahwa ketidakstabilan politik terjadi karena angkatan bersenjata tidak memiliki kekompakan. Sebuah ideologi yang dibutuhkan untuk menyatukan kembali angkatan bersenjata dan membuat perubahan politik. Tanggapan Sarit adalah konservatisme yang mengangkat prestise monarki, aturan birokrasi konsolidasi, dihapuskannya konstitusionalisme, dan kegiatan politik terbatas. Pada masa pemerintahannya, Sarit fokus membangun ekonomi Thailand, sehingga merugikan perkembangan pemerintahan demokrasi. Namun, ekonomi Thailand berkembang dengan pesat dan memperkuat sektor bisnisnya. Organisasi mahasiswa yang memimpin pemberontakan bersejarah pada tahun 1973 pun muncul akibat perluasan pendidikan yang dicanangkan sejak periode kekuasaan Sarit.

Kudeta pada tahun 1977 ditujukan untuk memperluas demokratisasi dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik. Kudeta ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer. Setelah kudeta tersebut, pemerintahan parlementer bertahan selama hampir 12 tahun. Partai politik mulai mendapat legitimasi. Komitmen masyarakat terhadap demokrasi mulai bangkit dan pihak militer mulai terkesan menerima kehadiran demokrasi. Namun, pihak militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Februari 1991. Hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Chatichai yang memerintah sejak tahun 1989 berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer. Meskipun kudeta berhasil dilaksanakan, militer menghadapi masalah dalam mengatasi kekuatan demokrasi yang tengah berkembang dengan pesatnya. Para pihak yang mendukung demokrasi memaksa pemimpin kudeta untuk menyetujui konsesi.

Setelah kudeta tahun 1932, misi dari militer berubah menjadi melindungi konstitusi dan rezim yang baru. Antara tahun 1932 hingga akhir Perang Dunia ke-2, misi militer bertambah menjadi mendukung Panglima Tertinggi Pibulsongkram sebagai pemimpin politik Thailand yang terkuat.

Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, misi dari militer Thailand adalah untuk menghadapi masalah komunisme, hingga akhirnya berintegrasi dengan sistem keamanan kolektif Amerika Serikat. Lima puluh persen dari biaya pertahanan Thailand dibiayai oleh Amerika Serikat. Berbagai bantuan militer lainnya pun diberikan oleh Amerika Serikat hingga militer Thailand berkembang dengan pesatnya. Namun hal ini tidak mempengaruhi militer dalam politik dan membuat kedudukan militer dalam politik semakin menguat.

Tiga dekade setelah Perang Dunia ke-2, kekuatan militer Thailand terpecah dan menjadi dasar kekuatan personal bagi tiga pemimpin militer tertinggi, yaitu Sarit, Thanom, dan Prapas. Partai politik seperti Partai Sosialis Nasional oleh Sarit dan Persatuan Masyarakat Thailand oleh Thanom serta Prapas hanyalah kedok atas kekuasaan yang terlegitimasi. Padahal, kekuatan militerlah yang memerintah pada rezim mereka.

Kegagalan militer dalam menekan pemberontakan komunis adalah salah satu faktor yang menyebabkan militer menginisiasi liberisasi dan membuat parlementer memerintah cukup lama pada tahun 1980an. Pihak militer percaya bahwa pemberontakan komunis bisa dengan mudah ditangani oleh kepolisian. Namun, pada tahun 1965 ketika pemberontakkan mulai menggunakan senjata di timur laut, pemerintah menekan para pemberontak menggunakan militer dengan asumsi hanya dengan militerlah komunis bisa dihentikan. Namun, tindakan ini justru menimbulkan pemberontakkan di wilayah Thailand yang lainnya. Kampanye militer melawan komunisme mulai dicanangkan pada tahun 1970an. Berbagai aksi kewarganegaraan digalakkan, namun tidak dapat menghentikan ekspansi dari pemberontakkan.

Setelah tahun 1977 ketika Jendral Kriangsak mengkudeta pemerintah, strategi baru dalam mengatasi pemberontakkan dicanangkan. Liberalisasi oleh militer dimulai tahun 1978 saat Kriangsak membuat kebijakan terhadap Partai Komunis Thailand dan berjanji untuk memberikan amnesti bagi anggota yang bergabung setelah tahun 1976. Strategi politik ofensif menjadi resmi saat pemerintahan Jendral Prem Tinasunalond menetapkan Peraturan Perdana Menteri No. 66/2523. Peraturan ini berisi untuk menekankan prioritas sarana politik dibandingkan dengan militer melalui penghapusan ketimpangan sosial ekonomi, promosi partisipasi politik, promosi institusi dan gerakkan demokrasi, serta jaminan kebebasan berpolitik.

Setelah kudeta tahun 1977, Perdana Menteri Kriangsak berjanji untuk menyebarluaskan konstitusi permanen dalam waktu setahun dan mengadakan pemilu beberapa bulan kemudian. Tuntutan untuk liberalisasi mulai muncul dari “The Thai Young Turks”. Mereka mendukung kepemimpinan yang kuat serta kudeta, tapi liberalisasi dan demokrasi dapat diterima bila dapat menyelesaikan konflik nasional dan menjanjikan stabilitas politik.

Walau telah berliberalisasi, Thailand masih menghadapi ketidakstabilan. Hal ini dikarenakan pohak militer masih terus memberi pengaruh politik. Kudeta tahun 1981 dan 1985 menunjukkan bahwa militer merasa terganggu dengan kebijakan demokrasi dan pembangunan partai politik.

Perdana Menteri Prem yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989 harus bisa menyeimbangkan antara militer dengan politik. Pada masa itu, liberalisasi dan demokrasi tengah dalam masa uji coba. Perdana Menteri dan militer sepakat bahwa dikarenakan Thailand masih dalam masa transisi, maka militer tidak dapat menarik diri dari ranah politik. Militer tidak dapat membiarkan partai politik mengambil alih negara. Mereka membentuk kabinet dan Perdana Menteri agar berada di pihak mereka. Partai politik pun tidak boleh ikut campur dalam beberapa hal.

Intervensi militer tahun 1991 merefleksikan ketidaksukaan angkatan bersenjata terhadap berkembangnya pengaruh partai politik dan masyarakat sipil yang mencoba untuk lebih menguasai militer. Setelah Jendral Suchinda mengundurkan diri dari tentara dan perdana menteri pada pemilu April 1992, masyarakat sipil mampu memaksa mantan panglima militier untuk turun. Ini adalah protes terbesar dalam sejarah Thailand setelah 1973.

Salah satu masalah demokratisasi di Thailand adalah karena lamanya periode dominasi birokratik dan militer, maka rezim demokratik terkadang sulit menegakkan legitimasi yang berkaitan dengan kultur politik tradisional. Fakta bahwa semua rezim demokratik di Thailand lemah dan inefisien telah mempengaruhi legitumasi mereka.

Militer lebih memilih perdana menteri non-partisan dengan dukugan penuh untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Namun, militer tidak megantisipasi kekuatan masyarakat sipil. Berusaha memaksa partai politik dan masyarakat untuk menerima Suchinda sebagai pemimpin pemerintahan adalah sebuah kesalahan besar. Ini merefleksikan ketidakmampuan militer elite untuk mengerti perkembangan kelompok masyarakat yang ditententukan untuk memperjuangkan demokratisasi dan melemahnya kekuatan militer.

Konsep kontrol sipil belum dapat diterima oleh militer dan terus memaksa dalam tugas penjagaan politik. Namun, masyarakat sipil telah menjadi ancaman nyata bagi militer. Beberapa kelompok profesi dan masyarakat menuntut keterlibatan militer dalam politik dihapuskan. Pemberontakkan ini berhasil menekan untuk reformasi politik. Dalam jangka panjang, jika politisasi dari kelompok masyarakat terus dilakukan, reformasi militer akan menjadi tak terelakkan dan sebagai hasilnya, politik demokrasi akan diberikan kesempatan lagi untuk mengkonsolidasikan dirinya.

Kemenangan dari kelompok pro-demokrasi pada pemilu September 1992—yang terdiri dari Partai Demokrat Chuan, Partai Aspirasi Baru, Partai Palang Dham dan Solidaritas—selanjutnya pemerintahan demokrasi yang dipimpin oleh Chuan, menandai perkembangan hubungan sipil dengan militer yang penting. Militer telah berjanji tidak akan ikut campur dalam politik dan akan mendukung pemerintahan.Untuk menenangkan militer, Chuan menunjuk seorang jendral pensiunan yang dihormati untuk memimpin kementrian pertahanan. Ia pun sangan berhati-hati dengan hal-hal teknis dengan harapan hubungan dengan militer tidak membahayakan.

1. **Kondisi Politik Thailand Terkait Kudeta Militer 2014**
2. **Rezim Thaksin Shinawarta**

Thaksin Shinawatra (lahir 26 Juli 1949) adalah seorang politikus Thailand. Ia adalah Perdana Menteri Thailand dari tahun 2001 hingga 2006 dan Ketua Partai Thai Rak Thai yang populer.

Gambar. 2.1 Thaksin Shinawarta

Perseteruan antara dirinya dan Partai Thai Rak Thai (TRT) dengan tiga partai oposisi besar (Partai Demokrat, Partai Chat Thai, dan Partai Mahashon) bermula dari kekecewaan kaum kelas menengah pada kepemimpinannya yang dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Dimotori antara lain oleh pengusaha penerbitan pers Sondhi Limthongkul yang membentuk aliansi anti-Thaksin bernama Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Sejak Desember 2005, mereka menggelar berbagai aksi demonstrasi. Gelombang unjuk rasa di Bangkok makin marak setelah mantan pemimpin Partai Palang Dharma dan mantan Gubernur Bangkok (Chamlong Srimuang) bergabung dan ikut menuntut Thaksin mundur.

Gelombang protes jalanan mencapai puncaknya menyusul terungkapnya kasus penjualan saham perusahaan Shin Corp oleh Phantongtae (anak Thaksin) kepada perusahaan asal Singapura bernama Temasek Holdings, dengan harga 1,9 miliar dollar AS. Dianggap sebagai salah satu aset bangsa bernilai strategis, perusahaan telekomunikasi raksasa milik keluarga Thaksin itu tak seharusnya dikuasai perusahaan asing. Apalagi dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penjualan dari transaksi raksasa yang dilakukan.

Di bawah tekanan berbagai kelompok yang menuntutnya mundur, Thaksin membubarkan majelis rendah (27 Februari 2006) dan memutuskan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang dipercepat (snap election) pada 2 April 2006. Pemilu yang diselenggarakan tiga tahun lebih cepat dari jadwal sebenarnya ini diyakini bisa membuktikan dukungan mayoritas rakyat terhadapnya, sekaligus membungkam kaum oposisi yang terus menuntutnya mundur. Memang, kemudian ia menang.

Partai TRT berhasil meraih 51 persen suara rakyat pengguna hak pilih. Persoalannya, pemilu ini diboikot ketiga partai oposisi utama yang sama sekali tak mengajukan calon-calon legislatornya untuk duduk dalam parlemen yang baru. Seruan boikot juga menghasilkan sekitar 10 juta suara abstain dan tidak sah, kemudian dimenangi partai Thaksin. Akibatnya, pemilu tak mampu menghasilkan para legislator dalam jumlah yang cukup untuk mengisi seluruh 500 kursi yang ada di parlemen.

Aksi penggembosan oleh partai-partai oposisi membuat di banyak daerah pemilihan para calon legislator (caleg) TRT maju sebagai calon tunggal. Akibatnya, mereka sulit meraih dukungan sampai 20 persen --jumlah suara minimum yang harus diraih seorang caleg tunggal yang maju tanpa pesaing. Sampai akhir penghitungan suara masih ada 38 kursi wakil rakyat yang kosong. Masih ada juga satu kursi lain yang kosong akibat ada caleg tunggal TRT yang didiskulifikasi.

Meski sempat mengklaim memenangi pemilu, Thaksin kemudian menyatakan mundur pada 4 April 2006, sesaat setelah ia beraudensi dengan Raja Bhumibol Adulyadej di Istana Hua Hin. Keputusan mengundurkan diri dilakukan di tengah ancaman PAD untuk melanjutkan aksi-aksi protesnya.

Pemilu yang diulang di 39 daerah pemilihan pada 23 April 2006 bertujuan mengisi kursi parlemen yang masih kosong juga tak membuahkan hasil karena tetap diboikot partai-partai oposisi. Pemerintahan yang baru pun tak bisa dibentuk karena menurut konstitusi, parlemen bisa mulai bersidang memilih perdana menteri dan membentuk pemerintahan baru hanya jika seluruh kursinya terisi.

Thailand makin tenggelam dalam krisis politik dan konstitusional akibat tak berfungsinya parlemen dan kevakuman kepemimpinan nasional. Titik terang mulai terlihat setelah Raja Bhumibol meminta tiga lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung Tata Usaha Negara segera bertindak untuk menyelesaikan krisis. Harapan semakin nyata setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu 2 April 2006 tidak sah dan memerintahkan diselenggerakan pemilu yang baru. Delapan hakim menyatakan pemilu 2 April itu melanggar konstitusi, sedang enam hakim menyatakan sebaliknya. Mahkamah Konstitusi turun tangan setelah Raja Bhumibol Adulyadej menolak campur tangan.

Pada 23 Mei 2006, Thaksin kembali menjabat Perdana Menteri setelah posisinya digantikan Wakil Perdana Menteri Chidchai Wannasathit. Langkah ini dinilai membingungkan dan sekaligus berpotensi menciptakan kerusuhan.[[3]](#footnote-3)

Menyusul kemenangan pemilu kedua Thaksin, kampanye reaksioner keji terhadap Thaksin diintensifkan. Para kritikus meluncurkan tuduhkan korupsi, meskipun mungkin benar, terhadap Thaksin dan usahanya untuk memprivatisasi BUMN disambut dengan perlawanan oleh lapisan tertentu dari kelas pekerja. Dalam beberapa kesempatan, kaum sosialis dan kaum royalis bergabung dalam protes anti-Thaksin. Fenomena kontradiktif ini adalah akibat dari posisi kontradiktif Thaksin dalam masyarakat Thailand – seorang pengusaha borjuis yang mewujudkan harapan lapisan masyarakat yang paling tertindas.

Tetapi kenyataannya adalah bahwa Thaksin masih sangat populer di daerah pedesaan, di antara lapisan yang paling tertindas, di mana ia mampu memobilisasi aksi unjuk rasa ratusan ribu orang dari seluruh daerah di Utara dan Timur laut Thailand. Bagi orang-orang yang paling tertindas ia masih dianggap sebagai harapan terbaik mereka untuk untuk mewujudkan perubahan mendasar.

Dengan pemilu yang dijadwalkan akhir tahun 2006, militer memutuskan untuk bertindak menggunakan protes yang dilakukan oleh kaum "Blue-Blood Jet-Set", sebuah kelas istimewa di Bangkok, untuk menutupi kudeta terhadap Thaksin. Kudeta ini terjadi meskipun dengan hanya 3000 pengunjuk rasa yang berada di luar Gedung Pemerintah pada saat itu dan dengan hanya 26% dari populasi di Bangkok, apalagi daerah pedesaan, yang mendukung pengunduran diri Thaksin.

Kudeta ini memicu ketidakstabilan politik dan konflik antara kaum royalis reaksioner, yakni kubu Kaus Kuning, dan para pendukung Thaksin, Kaus Merah, yang berlangsung selama lima tahun berikutnya. Tahun 2007 partai pro-Thaksin memenangkan pemilu namun kemudian dilarang menduduki jabatannya oleh keputusan pengadilan tahun 2008, yang sebenarnya adalah kudeta yudisial.

Selama periode tersebut, titik kritis terjadi pada tahun 2010 ketika pengunjuk rasa kaos merah menggelar demonstrasi besar menentang pemerintahan terpilih, Abhisit Vejjajiva. Ini secara brutal diremukkan dengan aksi kekerasan oleh kaum monarkis. Setelah militer turun tangan mengosongkan lokasi yang dijadikan tempat aksi protes di wilayah komersial Rajaprasong di pusat kota Bangkok, 92 orang tewas dan hampir 2,000 orang luka, baik tentara maupun warga sipil. Ini merupakan kekerasan politik terburuk dalam 20 tahun terakhir. Sekitar 400 orang masih ditahan, termasuk para pemimpin UDD (kelompok kaos merah) yang didakwa melancarkan upaya terorisme.

Dalam kondisi kacau, kaum penguasa terpaksa menggelar pemilu baru pada bulan Juli 2011 yang membawa Yingluck Shinawatra ke tampuk kekuasaan dengan platform yang memperlihatkan kedekatannya dengan Thaksin, sebuah kredensial yang jelas karena mereka adalah saudara kandung.Dia melanjutkan kebijakan-kebijakan untuk melayani kepentingan masyarakat miskin pedesaan, dengan subsidi beras yang memberikan jaminan harga yang lebih tinggi bagi para petani Thailand untuk hasil panen mereka daripada yang akan diterima dari pasar internasional. Meskipun Thailand digambarkan sebagai negeri industri baru, namun pertanian masih merupakan sektor penting ekonomi, oleh karena itu kebijakan ini memiliki dampak yang sangat besar di seluruh negeri.

1. **Rezim Yingluck Shinawarta.**

Yingluck Shinawarta adalah seorang pebisnis wanita, politisi, anggota Partai Pheu Thai, dan menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand ke-28 setelah memenangkan pemilihan umum 2011. Yingluck adalah perdana menteri perempuan pertama yang memerintah Thailand, dan juga merupakan salah satu perdana menteri termuda Thailand selama 60 tahun tahun terakhir.[[4]](#footnote-4)



Gambar. 2.2 Yingluck Shinawarta

Sebuah perhitungan sederhana untuk mantan pengusaha dan Perdana Menteri Thailand ini untuk memenangkan pemilu Juli 2011 dan memimpin partai Pheu Thai: Jaminan harga pengadaan sawah petani di THB 15.000 (sekitar $ 450) per ton, 4000 baht di atas tingkat yang ditetapkan oleh Partai Demokrat sebelumnya dan hampir 50% di atas harga pasar global. Karena hampir 40% dari pekerja Thailand berada dalam bidang pertanian, dan mayoritas dari mereka adalah penghasil beras. Yingluck berlayar ke kemenangan dan dilantik pada tanggal 10 Agustus 2011.

Strategi yang digunakan adalah proses tiga langkah sederhana namun realistis: beli beras dari petani dengan harga yang telah meningkat, simpan dalam persediaan untuk mengurangi pasokan global dan menaikan harga global, dan menjualnya kembali kemudian pada harga yang lebih tinggi untuk memulihkan pengeluaran awal.

Pada saat itu Thailand adalah eksportir beras terbesar di dunia, mengontrol 30% pasar. Yingluck piker pangsa pasar ini cukup besar untuk memanipulasi harga global.[[5]](#footnote-5)

Krisis politik Thailand merupakan periode ketidakstabilan politik di Thailand. Protes anti-pemerintah berlangsung antara November 2013 dan Mei 2014, yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Demokratik Reformasi (PDRC), kelompok penekan politik didirikan dan dipimpin oleh mantan Partai Demokrat MP Suthep Thaugsuban. Protes yang akhirnya mengakibatkan penghapusan perdana menteri berkuasa Yingluck Shinawatra, sebuah kudeta dan pembentukan junta militer.

Yingluck didakwa karena melakukan keteledoran untuk peranannya terkait skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian bagi negara senilai miliaran dolar. Mahkamah Agung memutuskan pada 19 Maret 2015 apakah kasus itu akan diteruskan, menurut sekretaris pengadilan Theerathai Charoenwong. Yingluck dipaksa turun dari jabatannya pada Mei tahun lalu karena masalah hukum terpisah, beberapa hari sebelum pemerintahannya digulingkan melalui kudeta militer. Kudeta itu mengakhiri unjuk rasa berbulan-bulan yang diorganisasi oleh para pendukung pihak yang menentang kebijakan-kebijakan populis pemerintahannya, termasuk subsidi beras..[[6]](#footnote-6)

Jika Senat memutuskan adik Thaksin itu bersalah, dia akan dilarang berpolitik selama lima tahun. Sejumlah anggota Shinawarta dan 150 politisi era Thaksin telah dilarang berpolitik selama lima tahun sejak 2007.

Seperti yang diketahui, Yingluck dituding melakukan penyimpangan dana skema beraskarena sejak akhir tahun lalu pemerintah tak lagi mampu membayar hasil panen petani sesuai dengan harga saat program itu dirilis tahun 2011 lalu. Kegagalan pemerintah membayar beras petani itu membuat kaum tani seantero Thailand berdemostrasi. Bahkan, mereka yang sejatinya pendukung Yingluck itu, sebagian mengalihkan dukungan kepada kelompok oposisi.

Sementara itu, sehari setelah Yingluck dilengserkan, kondisi Thailand memanas. Aksi terror yang ditujukan kepada massa anti-Yingluck dilaporkan semakin meningkat. Begitu juga terror terhadap sejumlah hakim yang memutuskan adik Thaksin itu bersalah. Dilaporkan, kediaman seorang hakim Mahkamah Konstitusi Thailand yang sehari sebelumnya melengserkan pemimpin perempuan pertama Thailand itu dilempar granat. Menurut Kolonel Kamthorn Auicharoen dari kepolisian Thailand, tak ada korban dalam insiden itu. Polisi menduga pelaku pelemparan granat hanya ingin memperkeruh kondisi politik di Thailand yang memang saat ini sedang panas. Teror granat juga terjadi di kantor pusat sebuah bank komersial dan sebuah fasilitas riset ilmiah. Banyak yang menduga aksi terror itu dilakukan para pendukung Yingluck yang disebut Kasu Merah. Namun sejauh ini sangkaan itu belum terbukti.[[7]](#footnote-7)

Angkatan Bersenjata Thailand melengserkan kepemerintahan terpilih dengan paksa setelah diberlakukannya status darurat militer. Pemimpin tertinggi militer Jenderal Prayuth Chan ocha secara resmi mengambil alih tanggung jawab perdana menteri Thailand. Pengambilalihan kekuasaan terjadi setelah upaya Prayuth untuk menengahi perseteruan antara kelompok politik tidak menunjukkan hasil. Dialog yang diprakarsai militer antara dua kubu yang bertentangan gagal mencapai kesepakatan. Militer memberlakukan jam malam dari pukul 10 malam hingga 5 pagi. Pengguna jalan berbondong-bondong masuk rumah. Kawasan lampu merah Bangkok bahkan tampak gelap. Militer juga memerintahkan penghentian penyebaran pesan yang dapat memancing kerusuhan atau memicu tentangan terhadap dewan militer. Jika tidak mematuhi, militer akan menangguhkan operasi layanan media sosial terkait. Kudeta menandai kekacauan terbaru di negara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi cepat. Sebelumnya demonstran berkali-kali turun ke jalan.Tuntutan terbesar mereka adalah melengserkan pemerintahan yang dikuasai klan Shinawatra. Thaksin dikudeta pada 2006, lalu lari ke luar negeri. Demonstran menginginkan pemerintah yang ditunjuk oleh pihak kerajaan, demi mengakhiri kebijakan populis klan Shinawatra. Jenderal Prayuth dan petinggi lain militer menyebut kudeta sebagai peluang mengatur ulang perpolitikan Thailand [[8]](#footnote-8)serta melangsungkan reformasi guna menghormati demokrasi.

Saat kondisi darurat diumumkan, ribuan tentara didukung persenjataan dan kendaraan tempur disebar ke lokasi-lokasi vital, seperti pusat-pusat perekonomian, stasiun televisi, dan kawasan-kawasan perhotelan.Serdadu diturunkan di jantung kota Bangkok. Stasiun televisi menyiarkan pesan darurat. Menyusul konflik antara pemerintah dan oposisi, militer Thailand memberlakukan status darurat perang.Menyusul krisis politik berkepanjangan yang membekap Thailand sejak bertahun-tahun lalu, angkatan bersenjata secara sepihak memberlakukan darurat militer untuk seluruh negeri. Mereka dikabarkan menyambangi beberapa stasiun televisi dan meminta pengelola untuk menyiarkan pesan militer kepada seluruh penduduk. Langkah tersebut diambil untuk "menciptakan perdamaian dan keamanan untuk semua penduduk," tulis petinggi militer dalam siaran persnya.[[9]](#footnote-9)

* + 1. **Darurat Militer**

Di masa kepemimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ketegangan antara pemerintah dan oposisi terus meningkat selama beberapa bulan berikutnya. Dua pekan setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Shinawatra mengundurkan diri, Angkatan Bersenjata Thailand mengumumkan darurat militer. Pengumuman tersebut praktis memberikan kekuatan yang lebih luas kepada tentara untuk melaksanakan keputusannya, termasuk mengambil alih stasiun televisi. Militer bersikukuh tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mereka terhadap negara, bukan kudeta. Langkah militer tersebut diklaim demi menghentikan kelompok-kelompok yang menggunakan senjata untuk memerangi pemerintahan. Bahkan dalam pemberitaan di televisi, dikatakan bahwa darurat militer dilaksanakan semata-mata untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban bagi semua orang. Penerapan darurat militer tidak akan berdampak terhadap pemerintahan sementara. Namun, Kepala Penasihat Keamanan bagi Perdana Menteri sementara, Paradorn Pattanatabut mengatakan keputusan militer tidak pernah dikonsultasikan dengan pemerintah. “Semua normal, kecuali masalah tanggung jawab militer untuk keamanan nasional,” kata Pattanatabut. Seorang juru bicara di pemerintahan menginformasikan bahwa akibat keputusan militer tersebut, sebabkan terjadinya pergantian posisi kesatuan militer di sejumlah titik di Bangkok. Pada 2006, militer Thailand juga pernah mengambil alih kekuasaan. Setidaknya militer telah melakukan kudeta sebanyak 11 kali sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932.

* + 1. **Darurat Ekonomi[[10]](#footnote-10)**

Langkah – langkah darurat ekonomi Thailand dipaparkan Panglima Angkatan Udara Thailand Marsekal Prajin Juntong setelah rapat dengan pejabat kementrian ekonomi. Ia menyebut ada 30 proposal penting bidang ekonomi yang akan dibahas dengan pemimpin kudeta, Jendral Prayuth Chan-Ocha. Diantara proposal yang diajukan, terdapat jaminan harga beras petani sebagai ganti skema subsidi yang menyedot banyak dana di bawah pemerintahan PM Yingluck Shinawarta.

Pada era Yingluck, skema subsidi itu tidak berjalan dan menunggak selama berbulan – bulan. Setelah mengambil alih kekuasaan, junta mendesak pencairan subsidi itu bagi petani sebesar 92 miliar baht (Rp. 32,98 triliun) atau lebih tinggi dari anggaran kepolisian nasional Thailand dalam setahun.

Selain itu, militer juga akan memberantas lintah darat yang mencekik petani. Sebagai gantinya, petani bakal mendapat pinjaman berbunga rendah. Marsekal Juntong, yang menangani urusan ekonomi di jajaran junta, memaparkan, langkah darurat ekonomi itu juga mencakup rencana jangka panjang, seperti pengembangan zona ekonomi khusus di daerah – daerah perbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Malaysia.

Militer merebut kekuasaan di Thailand lewat kudeta tak berdarah, 22 Mei lalu, setelah negeri itu dilanda unjuk rasa dan konflik berbulan – bulan. Kekacauan politik ini membuat kantor – kantor kementrian tutup, menurunkan kepercayaan bisnis, dan membuat ekonomi melemah.

Inflasi di Thailand pada bulan mei saat militer melancarkan kudeta meningkat 0,40% dibandingkan April. Itu peningkatan inflasi terbesar dalam 14 bulan terakhir.

Amparwon Pichalai, penasihat Kementrian Perdagangan Thailand, memaparkan, inflasi meningkat 2,21% pada lima bulan pertama tahun ini, seperti ditunjukan indeks harga konsumen (CPI). Indeks harga konsumen utama meningkat 1,75 pertahun dan 0,13% pada Mei lalu, membuat rata-rata inflasi Januari-Mei 1,40%.

Turisme yang menyumbang 10% ekonomi Thailand juga terpukul pasca kudeta pada tanggal 22 Mei lalu. Menurut data sampel Asosiasi Travel Asia Pasifik, yang dikutip Koran *The Nation,* pada 19 Mei tercatat 28.000 pesanan perjalanan per hari ke Thailand. Namun pada 23 Mei atau hari setelah kudeta, data harian mencatat 5000 pembatalan pesanan perjalanan ke negeri itu. Akibat kekacauan politik, target jumlah wisatawan asing tahun ini ke Thailand telah direvisi dari 28 juta menjadi 26 juta. Pemasukan dari turisme dikoreksi dari 2 triliun baht (Rp. 714 triliun) menjadi 1,8 triliun baht.

Juru bicara Kementrian Luar Negeri Thailand, Sek Wannamethee, mengungkapkan 63 negara mengeluarkan peringatan perjalanan ke Thailand; 19 negara diantaranya merekomendasikan warganya tidak berpergian ke tempat itu.

Menurut Juntong, prioritas utama dalam langkah-langkah darurat penyelamatan ekonomi itu adalah memulihkan kepercayaan investror dan menjaga disiplin fiscal.

* + 1. **Bangkok Shutdown**

*People's Democratic Reform Committee* (PDRC) mengancam akan melumpuhkan Bangkok (Bangkok Shutdown) dengan tidak mengenal batas waktu. Hal tersebut dilakukan dengan menutup jalan utama ke kompleks pemerintahan serta pusat perekonomian. Demi alasan keamanan para pegawai pemerintah diliburkan, namun pusat-pusat bisnis masih tetap beroperasi secara normal. Pelumpuhan tersebut baru akan dihentikan setelah PDRC memenangkan pertarungan. Pergerakan PDRC itu menuai gerakan massa pro-pemerintah di bagian utara Thailand, yang pada pemilu sebelumnya dikuasai partai Pheu Thai yang pro-pemerintah. Pemimpin PDRC Suthep meluncurkan ‘*Final Battle’* dengan mengintimidasi media. Pada tanggal 9 Mei 2014 para demonstran berkumpul ke gedung Channel 3, 5, 7, 9, dan NBT, dimana mereka menetap semalaman untuk memastikan media tidak menyimpang dari cakupan PDRC. Menurut Suthep, agensi media ini merupakan “*mouth pieces*” dari pemerintahan dan harus menahan diri untuk melakukan penyiaran lagi yang “propaganda” pro-pemerintah. Mereka tidak harus melaporkan berita atas nama para orang yang menyalahgunakan kekuasaan karena mendistorsi kebenaran, ditambah bahwa dia bermaksud untuk meminta kerjasama dari stasiun - stasiunini untuk menyiarkan pidatonya pada saat dia mencapai kemenangannya.

The Thai Journalist Association, the Thai Broadcast Journalists Association dan Human Rights Groups mengecam gerakan PDRC bahwa mereka mengancam hak dasar media dan kebebasan untuk menyajikan fakta tanpa gangguan. Intimidasi ini terjadi sebelum saat kampanye Bangkok Shutdown.[[11]](#footnote-11)

Sejauh ini para pemimpin partai masih percaya bahwa militer tidak akan melancarkan kudeta. Perdana Menteri Yingluck telah menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia menyatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menjaga demokrasi dan mempunyai tugas konstitusional untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri. PM Yingluck berkeras bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin dalam di Thailand adalah lewat pemilihan umum.

PM Yingluck telah memberikan usulan untuk menunda pemilu menjadi 4 Mei 2014 serta mengusulkan pembentukan dewan reformasi nasional sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan krisis politik yang sudah berlangsung beberapa bulan. Jika rakyat tidak lagi menginginkan pemerintahan ini, maka mereka harus datang dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Sebagian besar lawan politik Yingluck tidak menginginkan digelarnya pemilu Mereka khawatir lewat pemilu justru keluarga Shinawatra atau sekutunya yang akan berkuasa kembali di Thailand. Kelompok oposisi menolak semua tawaran politik yang diajukan pemerintah berkuasa. Pertikaian politik yang sedang terjadi sepertinya tidak memiliki jalan tengah. Sehingga Yingluck harus mencari alternatif solusi bagi kalangan rakyatnya.

1. <http://www.militanindonesia.org/internasional/asia/thailand/8486-kudeta-dan-krisis-di-thailand-kaos-merah-harus-melawan-balik.html> diakses pada tanggal 23 April 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Annisa Hardhany, “Militer dan Demokrasi Thailand”, <http://www.academia.edu/5298570/Militer_dan_Demokrasi_di_Thailand> diunduh pada tanggal 23 April 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://id.wikipedia.org/wiki/Thaksin_Shinawatra> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://id.wikipedia.org/wiki/Yingluck_Shinawatra> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://thediplomat.com/2015/05/the-rice-and-fall-of-yingluck-shinawatra/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.cumaberita.com/internasional/militer-thailand-melakukan-kudeta-ambil-alih-kekuasaan.html> diakses pada tanggal 23 April 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. Huminca Sinaga, “Yingluck Hadapi Kasus Lain”, Pikiran Rakyat, Jakarta 9 Mei 2014, hlm. VIII. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.dw.de/militer-thailand-berlakukan-darurat-perang/a-17647315> diakses pada tanggal 23 April 2015 [↑](#footnote-ref-9)
10. Reuters/Sam, “ Thailand Darurat Ekonomi”, Kompas, Jakarta 3 Juni 2014, hlm, VIII. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://en.wikipedia.org/wiki/2013%E2%80%9314_Thai_political_crisis> diakses pada tanggal 29 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-11)